

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis mengungkapkan bahwa kepemimpinan perempuan dan partisipasi anggota legislatif perempuan memengaruhi proporsi anggaran berbasis gender untuk kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur dari tahun 2023 hingga 2025. Berdasarkan pendahuluan, penelitian literatur, pengolahan data, pembahasan di bab sebelumnya, kesimpulan berikut dapat dibuat:

- a. Kepemimpinan perempuan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap proporsi anggaran berbasis *pro gender budgeting*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan daerah belum dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan alokasi anggaran yang responsif gender, sehingga implementasi *pro gender budgeting* juga dipengaruhi oleh variabel tambahan, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik daerah, seperti social welfare ratio, poverty rate dan female population
- b. Partisipasi anggota DPRD perempuan berpengaruh positif terhadap proporsi anggaran berbasis *pro gender budgeting*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, maka semakin tinggi pula kemungkinan meningkatnya alokasi anggaran yang responsif gender, karena anggota DPRD perempuan cenderung memiliki perhatian yang

lebih besar terhadap isu kesetaraan gender serta kebutuhan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian mempunyai keterbatasan pada sumber data sekunder yang bersumber dari APBD dan Rancangan Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengandung bias atau ketidaklengkapan informasi. Keterbatasan waktu dan sumber daya juga menghambat dalam proses analisis yang sedang dilakukan. Selain itu, peneliti juga mengalami kendala dalam proses perhitungan anggaran berbasis *pro gender budgeting* khususnya dalam mengidentifikasi serta mengelompokkan program atau kegiatan yang benar-benar mencerminkan responsivitas gender. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan format pelaporan antar daerah serta keterbatasan informasi yang tersedia dalam dokumen APBD dan RKPD, sehingga tidak seluruh komponen anggaran dapat dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk melakukan perhitungan anggaran berbasis *pro gender* secara teliti agar dapat memperoleh hasil perhitungan yang valid mengenai anggaran berbasis *pro gender*.

5.3 Saran

5.3.1 Saran Teoritis

Menurut uraian di atas terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan hasil penelitian dan memperluas populasi penelitian, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel atau indikator

tambahan yang dapat mempengaruhi proporsi anggaran berbasis gender. Selain itu, diharapkan untuk menambahkan periode tahun ke tahun berikutnya.

5.3.2 Saran Praktis

Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam penerapan anggaran berbasis *pro gender budgeting* melalui pengintegrasian perspektif gender pada setiap tahap perencanaan hingga penganggaran. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas data serta transparansi dalam penyusunan dokumen APBD dan RKPD, sehingga informasi mengenai program dan kegiatan yang responsif gender menjadi lebih jelas, akurat, dan mudah diakses.

5.4 Implikasi

5.4.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini membantu literatur berkembang terkait anggaran berbasis *pro gender budgeting*, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak berpengaruh terhadap proporsi anggaran berbasis *pro gender budgeting*, sehingga memperluas pemahaman dalam teori keagenan bahwa keberadaan perempuan sebagai kepala daerah belum tentu secara langsung mampu mendorong peningkatan kebijakan anggaran yang responsif gender. Hasil penelitian mencerminkan bahwa pengambilan kebijakan anggaran tidak dipengaruhi oleh karakteristik individu pemimpin, tetapi juga oleh faktor lain seperti keterbatasan kelembagaan, prioritas

pembangunan daerah, serta dinamika politik yang berkembang dalam pemerintahan.

Selain itu, temuan bahwa partisipasi anggota DPRD perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi *pro gender budgeting* memperkuat relevansi teori legitimasi, yang menekankan pentingnya representasi perempuan dalam meningkatkan kualitas dan penerimaan kebijakan publik. Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif terbukti mampu mendorong perhatian yang lebih besar terhadap isu kesetaraan gender, sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.

Selain itu, penelitian ini turut memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi penganggaran responsif gender, dengan menunjukkan bahwa aspek representasi perempuan perlu didukung oleh kondisi fiskal daerah yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan penerapan *pro gender budgeting* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perempuan dalam struktur pemerintahan, tetapi juga oleh komitmen institusional, kapasitas keuangan daerah dalam proses penganggaran dan perencanaan daerah.

5.4.2 Implikasi Praktis

Temuan penelitian memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan penerapan anggaran berbasis *pro gender budgeting* secara lebih efektif. Penelitian menjelaskan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan, terutama dalam lembaga legislatif, dapat berkontribusi terhadap alokasi anggaran

yang lebih memasukan kebutuhan gender. Dengan demikian, pemerintah daerah dan partai politik perlu mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas, pengembangan kepemimpinan, serta pemberian akses yang lebih luas dalam perumusan kebijakan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat komitmen institusional dalam mengintegrasikan perspektif gender pada setiap tahapan perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kemampuan fiskal daerah agar memiliki ruang yang lebih besar dalam mendukung program-program yang berorientasi pada kesetaraan gender. Dengan demikian, kolaborasi antara peningkatan representasi perempuan, komitmen pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah yang optimal diharapkan mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.